

**Feby Yolanda S**

**2313031068**

**Kelas 2023 C**

**Soal Diskusi P. 6**

**1. Bagaimana ketimpangan dalam input pendidikan (guru, fasilitas, teknologi) memengaruhi hasil pendidikan di daerah?**

Ketimpangan dalam input pendidikan seperti sebaran guru, kualitas fasilitas, hingga penetrasi teknologi, merupakan akar dari pelestarian ketimpangan sosial di Indonesia. Secara teoretis, pendidikan adalah instrumen mobilitas vertikal, namun faktanya, kondisi objektif dunia pendidikan kita masih dihadapkan pada masalah kualitas proses pembelajaran yang konvensional dan kinerja guru yang belum optimal. Di daerah terpencil atau tertinggal, kita masih menemukan ruang kelas yang rusak, keterbatasan aksesibilitas, serta kekurangan tenaga pengajar yang kronis. Ketika input fisik dan manusia ini timpang, maka hasil pendidikan atau *outcome* yang dihasilkan pun akan sangat kontras antara kota dan desa. Input yang lemah di daerah tertinggal mengakibatkan rendahnya daya saing lulusan, yang pada gilirannya memperanggeng siklus kemiskinan karena mereka tidak mampu terserap ke dalam pasar kerja modern yang menuntut keahlian tinggi.

**2. Mengapa kebijakan afirmatif seperti KIP, BOS, atau program inklusi belum optimal dalam meratakan permintaan dan supply pendidikan?**

Kebijakan afirmatif seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP merupakan upaya negara untuk mewujudkan "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*) tanpa diskriminasi. Namun, mengapa program ini belum optimal dalam meratakan *supply* dan *demand*? Salah satu hambatan terbesarnya adalah struktur belanja pendidikan itu sendiri. Data menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan meningkat, sebagian besar dana sekitar 80% hingga 85% habis terserap hanya untuk belanja pegawai atau gaji guru. Hal ini menyisakan porsi yang sangat kecil, hanya sekitar 15% hingga 25%, untuk belanja modal dan operasional yang seharusnya bisa dirasakan langsung oleh peserta didik. Selain itu, bagi kelompok masyarakat paling miskin, hambatan finansial bukan hanya soal SPP gratis, tetapi juga biaya non-pendidikan seperti buku, transportasi, dan biaya hidup yang masih tinggi, sehingga subsidi pemerintah yang rendah sering kali tetap membuat pendidikan terasa mahal.

**3. Apakah investasi pemerintah pada pendidikan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi wilayah tertinggal? Jelaskan menggunakan data empiris.**

Investasi pada modal manusia (*human capital*) secara teoretis menyumbang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; sebagai contoh, di Amerika Serikat, pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia

menyumbang sekitar 31% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di wilayah tertinggal seperti beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, investasi pemerintah melalui kenaikan belanja pendidikan yang signifikan sering kali belum berdampak langsung secara instan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun anggaran naik, angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di banyak daerah masih rendah, hanya berkisar antara 5 hingga 7 tahun, yang berarti banyak penduduk yang bahkan belum tuntas program pendidikan dasar 9 tahun. Ketidaksinkronan ini terjadi karena adanya *time-lag* dalam investasi manusia dan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi juga sangat bergantung pada ketersediaan lapangan kerja yang mampu menyerap modal manusia yang telah dididik tersebut.

#### **4. Apa perbedaan pendekatan kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan vs. meningkatkan kualitas pendidikan? Mana yang harus didahulukan?**

Perdebatan mengenai mana yang harus didahulukan antara akses dan kualitas adalah sebuah dilema klasik. Kebijakan akses fokus pada penyediaan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau letak geografis. Di sisi lain, kebijakan kualitas fokus pada peningkatan mutu masukan, proses pembelajaran, hingga kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurut pandangan saya, keduanya harus berjalan beriringan secara simultan, namun penguatan infrastruktur dasar di daerah tertinggal adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Membuka akses tanpa menjamin kualitas hanya akan menghasilkan "pengangguran terdidik", sementara mengejar kualitas tanpa pemerataan akses hanya akan menciptakan elitisme pendidikan yang memperlebar jurang ketimpangan pendapatan.

#### **5. Bagaimana peran sektor non-pemerintah (swasta, komunitas) dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia?**

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menanggung beban pembangunan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta sangat krusial, terutama melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kemitraan dengan Dunia Usaha serta Dunia Industri (DUDI). Sektor non-pemerintah dapat berperan dalam mengisi celah pembiayaan yang tidak tercover oleh APBN/APBD, seperti penyediaan fasilitas teknologi industri atau program beasiswa khusus. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai kontrol sosial untuk memastikan penggunaan dana pendidikan transparan dan tepat sasaran. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya sistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga efisiensi pendidikan dapat tercapai dan lulusan memiliki keterampilan hidup (*life skills*) yang optimal untuk membangun kemandirian ekonomi daerahnya.